



## Implementasi Kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang

Christivany Orchita<sup>1\*</sup>, I Putu Yoga Bumi Pradana<sup>2</sup>, Aspri Budi Oktavianto<sup>3</sup>, David Wilfrid Rihi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [hannyorchita0@gmail.com](mailto:hannyorchita0@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [yoga.pradana@staf.undana.ac.id](mailto:yoga.pradana@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [aspribudi@staf.undana.ac.id](mailto:aspribudi@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>, [david.rihi@staf.undana.ac.id](mailto:david.rihi@staf.undana.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [hannyorchita0@gmail.com](mailto:hannyorchita0@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** This study aims to analyze the implementation of the household waste management policy by the Kupang City Environmental and Sanitation Agency and identify supporting and inhibiting factors. The study employed a qualitative method with a descriptive approach, using the policy implementation model as the basis for analysis. The results indicate that the implementation of the policy has not been optimal. Key challenges include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low levels of public awareness and participation in waste management practices. Additionally, rapid population growth has led to an increase in waste volume, while the capacity of waste management remains limited. Despite these challenges, there are positive factors that support the policy's implementation, such as the waste bank program, which has played a significant role in increasing public participation in waste sorting and recycling. The policy's direction is clear, yet various technical and social obstacles hinder its success. To improve the effectiveness and sustainability of waste management in Kupang City, it is necessary to focus on enhancing human resource quality, upgrading infrastructure, and strengthening public awareness and engagement in waste management practices. These improvements are crucial for achieving long-term, effective waste management solutions in the city.

**Keywords:** Kupang City; Kupang City Environmental; Policy Implementation; Public Participation; Waste Management.

**Abstrak.** Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Kota Kupang dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan model implementasi kebijakan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat telah menyebabkan peningkatan volume sampah, sementara kapasitas pengelolaan sampah masih terbatas. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, terdapat faktor-faktor positif yang mendukung implementasi kebijakan, seperti program bank sampah, yang telah berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang sampah. Arah kebijakan sudah jelas, namun berbagai kendala teknis dan sosial menghambat keberhasilannya. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Kupang, perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah. Perbaikan-perbaikan ini sangat penting untuk mencapai solusi pengelolaan sampah yang efektif dan jangka panjang di kota tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Kota Kupang; Lingkungan Kota Kupang; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Sampah.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi berdampak langsung terhadap peningkatan volume sampah, khususnya di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial (Riama, 2020). Peningkatan konsumsi masyarakat serta aktivitas domestik menghasilkan limbah yang semakin kompleks, sehingga pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang krusial dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional mencapai sekitar 64 juta ton per tahun atau setara dengan 92,69 kg per orang per tahun (Rahmawati et al., 2021), yang mencerminkan besarnya beban pengelolaan sampah di Indonesia.

Permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi oleh paradigma konvensional “kumpul, angkut dan buang”, yang belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengelolaan secara terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, sistem distribusi pengangkutan yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, sampah tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap bencana seperti banjir serta menimbulkan dampak kesehatan masyarakat.

Dalam konteks daerah, Kota Kupang menghadapi permasalahan serupa dengan tren peningkatan timbulan sampah yang signifikan dari tahun ke tahun. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menunjukkan bahwa timbulan sampah meningkat dari 227,93 ton per hari pada tahun 2022 menjadi 238,32 ton per hari pada tahun 2024. Meskipun telah dilakukan upaya pengelolaan melalui pengangkutan dan pengolahan sampah, masih terdapat sejumlah besar sampah yang belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas pengelolaan dan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat.

Selain faktor teknis, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Kupang juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat serta belum optimalnya implementasi kebijakan daerah. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penumpukan sampah, keterbatasan sarana prasarana, serta ketidakteraturan dalam sistem pengangkutan. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa sebagian besar sampah berasal dari sektor rumah tangga, yang mencapai sekitar 48% dari total timbulan sampah (DLHK Kota Kupang, 2023).

Di sisi lain, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar, namun masih didominasi oleh tenaga honorer dengan keterbatasan kompetensi teknis. Selain itu, keterbatasan sarana operasional seperti kendaraan pengangkut dan alat berat yang tidak seluruhnya dalam kondisi baik turut menghambat efektivitas pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Menurut Conyers (1992), partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan karena dapat meningkatkan keberhasilan program melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi ini mencakup kesadaran untuk memilah sampah, mendukung program daur ulang, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kota Kupang merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah perkotaan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebijakan tidak hanya berupa rencana, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata (Agustino, 2008). Anderson (dalam Tahir, 2014) membedakan kebijakan menjadi kebijakan substantif (apa yang dilakukan) dan prosedural (bagaimana pelaksanaannya).

Dye (dalam Adnro, 2014) menyatakan bahwa kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, Easton (dalam Ramdhani, 2017) melihat kebijakan sebagai proses alokasi nilai kepada masyarakat. Proses kebijakan menurut Dunn (1998) meliputi tahapan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi

merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk merealisasikan kebijakan (Wahab, 2015).

Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa implementasi melihat bagaimana kebijakan berjalan di lapangan dan dampaknya bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Kupang, implementasi kebijakan diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemilahan sampah.

### **Model dan Faktor Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nugroho (2009) menyatakan bahwa implementasi menjadi faktor utama keberhasilan kebijakan. Beberapa faktor penting dalam implementasi antara lain:

- a. Komunikasi, yaitu kejelasan informasi kebijakan
- b. Sumber daya, seperti tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas
- c. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana
- d. Struktur birokrasi, yaitu sistem organisasi yang mendukung

Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta dukungan masyarakat (Suaib, 2016). Dalam kasus Kota Kupang, hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya koordinasi pemerintah.

### **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup makhluk hidup dan unsur lainnya yang saling berinteraksi (UU No. 32 Tahun 2009). Lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, namun sering dianggap sebagai objek eksploitasi (Supriyadi, 2006).

Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan (Manurung & Santosa, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

### **Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dari pengumpulan hingga pembuangan akhir (Perda Kota Kupang No. 3 Tahun 2011). Sampah sendiri merupakan sisa bahan yang sudah tidak bernilai dan dapat menimbulkan pencemaran (Hadiwiyoto, 1983).

Pengelolaan sampah modern menggunakan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi volume sampah. Proses pengelolaan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Di Kota Kupang, sistem pengelolaan sampah sudah dilakukan secara bertahap, namun masih belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti, khususnya terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi nyata di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Siagian, 2011).

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011, yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Analisis dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi implementor, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu agar mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam (Sugiyono, 2008). Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala bidang terkait, staf pelaksana, serta masyarakat dan pihak bank sampah yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung kondisi lapangan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan, dan dokumen kebijakan (Zuriah, 2009; Rita et al., 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data (Mekarisce, 2020).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Kupang dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi implementor, serta lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah memiliki landasan hukum yang jelas, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, pengelolaan sampah di Kota Kupang telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 dan 4 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Standar kebijakan tersebut telah diterjemahkan ke dalam prosedur operasional melalui SOP DLHK, sehingga secara normatif telah memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas. Sasaran utama kebijakan diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan dan daur ulang. Namun, dalam implementasinya, sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan sosial yang lebih intensif.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan beban kerja yang tinggi serta belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah. Selain itu, keterbatasan anggaran yang bergantung pada APBD mengakibatkan tidak semua program dapat terealisasi secara maksimal. Dari sisi sarana prasarana, meskipun telah tersedia fasilitas seperti TPS, TPST, dan bank sampah, pemanfaatannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan kendaraan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatannya.

Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan telah berjalan melalui koordinasi antara DLHK dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta masyarakat. Koordinasi ini mencakup penentuan lokasi TPS, sosialisasi kebijakan, serta pelaksanaan program lingkungan. Selain itu, mekanisme pelaporan dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan, meskipun masih bersifat manual. Umpan balik dari masyarakat juga telah difasilitasi melalui pengaduan yang ditindaklanjuti oleh petugas. Namun demikian, komunikasi yang ada

masih bersifat operasional dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang terintegrasi, sehingga efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek karakteristik badan pelaksana, DLHK Kota Kupang memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang terarah antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait. DLHK berperan sebagai leading sector dalam pengelolaan sampah, sementara masyarakat berperan dalam pengurangan sampah. Meskipun demikian, penerapan norma dan aturan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penegakan sanksi yang dinilai belum tegas. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah masih relatif rendah. Di sisi lain, sistem penghargaan telah diterapkan sebagai bentuk motivasi, meskipun belum sepenuhnya sebanding dengan risiko kerja yang dihadapi petugas.

Pada aspek disposisi implementor, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan relatif baik, namun partisipasi masyarakat masih bervariasi. Sebagian masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, tetapi tingkat keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah masih dipengaruhi oleh faktor kesibukan dan kesadaran individu. Dari sisi kognitif, masyarakat pada umumnya telah memahami dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, meskipun tingkat pemahaman tersebut belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat perlu didukung oleh edukasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek lingkungan eksternal, faktor ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi implementasi kebijakan. Dari sisi ekonomi, pengelolaan sampah melalui bank sampah memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Dari sisi sosial, tingkat kesadaran masyarakat masih beragam, sehingga diperlukan penguatan budaya sadar lingkungan. Dari sisi politik, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai regulasi dan program, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang telah berjalan secara normatif sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan aturan, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, peningkatan edukasi masyarakat, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum berjalan secara optimal meskipun secara normatif telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 3 dan 4 Tahun 2011. Ketidakefektifan implementasi tersebut terlihat dari masih tingginya timbunan sampah yang belum tertangani ( $\pm 30\%$  per hari), keterbatasan sarana prasarana seperti kendaraan operasional yang tidak memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber. Jika dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975), hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi, belum optimalnya penegakan norma dan sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat sebagai faktor lingkungan sosial. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bad implementation, karena meskipun kebijakan telah dirumuskan secara baik, pelaksanaannya belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang melalui penguatan aspek internal dan eksternal. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan guna membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penguatan sumber daya menjadi prioritas, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan berbasis konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta memperkuat koordinasi antar instansi guna menciptakan sinergi yang efektif. Di sisi lain, evaluasi terhadap struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), disertai dengan penegakan sanksi yang konsisten, menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.



## DAFTAR REFERENSI

- Adnro, A. (2014). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Conyers, D. (1992). *An introduction to social planning in the Third World*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. (2023). *Laporan pengelolaan sampah Kota Kupang*. Kupang: DLHK.
- Dunn, W. N. (1998). *Public policy analysis: An introduction* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan pemanfaatan sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Manurung, R., & Santosa, H. (2019). *Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan*. Jakarta: Kencana.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-152. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy: Teori, manajemen, dan analisis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Kupang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*. Kupang: Pemerintah Kota Kupang.
- Pemerintah Kota Kupang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengurangan Sampah*. Kupang: Pemerintah Kota Kupang.
- Rahmawati, D., et al. (2021). Analisis timbulan sampah nasional dan pengelolaannya. *Jurnal Lingkungan Indonesia*, 19(2), 85-94.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4261>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Riama, F. (2020). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan volume sampah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 45-52.
- Rita, R., et al. (2022). Metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, 6(1), 10-18.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suaib, E. (2016). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. (2006). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara